



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 02 /PANSELDA.TA/2023

TENTANG

**PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/188/46.02/2023 Tentang Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, dibuka kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 197 formasi dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
9. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/188/46.02/2023 Tentang Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JF TEKNIS

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
12. Masih aktif bekerja sampai dengan saat ini
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK JF TEKNIS

1. Penetapan pengisian jenis kebutuhan PPPK JF Teknis Tahun 2023 terdiri atas :
 - a. khusus; dan
 - b. umum
2. Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) huruf a meliputi :
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN)
3. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua) huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
4. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua) huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
5. Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) huruf b yaitu, tenaga kerja diluar pelamar jenis kebutuhan khusus yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun dan kualifikasi yang dipersyaratkan.
6. Akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - a. Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum dan disabilitas merupakan Lulusan Universitas/ Fakultas/ Program Studi yang terakreditasi dan IPK minimal 3.00;
 - b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus merupakan Lulusan Universitas/ Fakultas/ Program Studi yang terakreditasi;

7. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda
8. Pengalaman di bidang kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
9. Formasi jabatan yang mensyaratkan Persyaratan Wajib Tambahan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Contoh :

Persyaratan Wajib Tambahan yang harus dipenuhi oleh pelamar :

No	Jabatan	Keterangan
1	Pemadam Kebakaran Pemula	wajib memiliki dan melampirkan : 1. surat keterangan sehat 2. surat keterangan bukan penyandang disabilitas
2	Analisis Kebakaran	wajib memiliki dan melampirkan : 1. surat keterangan sehat 2. surat keterangan bukan penyandang disabilitas

10. Peserta yang mempunyai sertifikat kompetensi dapat melampirkan untuk Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
11. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
12. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dapat dilihat pada website di portal SSCASN BKN dan <http://bkd.tulungagung.go.id>;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada portal SSCASN BKN.
3. Calon pelamar log masuk (*login*) ke aplikasi SSCASN BKN dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
4. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar mengunggah berkas hasil pindai (*scan*) yang dipersyaratkan dan ikuti petunjuk, isi dan lengkapi data sesuai yang tertera pada portal SSCASN BKN;
7. Calon pelamar mencetak Kartu Informasi AKUN SSCASN Tahun 2023.
8. Dokumen persyaratan pendaftaran yang diunggah harus melalui proses pindai/scan warna dan mengupload sesuai menu yang tersedia di SSCASN:
 - a. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah berpakaian formal polos, posisi portrait, dengan rasio 3 x 4. Pas foto bukan editan/filter.
 - b. Asli KTP yang masih berlaku atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai/ e- meterai Rp. 10.000,00 (contoh format terlampir);
 - d. Surat lamaran diketik komputer ditujukan kepada Bupati Tulungagung di Tulungagung ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai/ e- meterai Rp 10.000,00 (contoh format terlampir);
 - e. Asli Ijazah Pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar dan dokumen Ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu file (format pdf);

- f. Asli Transkrip Nilai Akademik dan dokumen transkrip nilai yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu file (format pdf);
 - g. Asli dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 tahun secara terus menerus dan distempel basah (contoh format terlampir);
 - h. Persyaratan Wajib Tambahan dan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- 9. Pelamar wajib memperhatikan jenis file masing-masing dokumen yang akan diupload/unggah sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada portal SSCASN
 - 10. Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar sesuai persyaratan dan dokumen yang diunggah harus jelas dan tidak terpotong;
 - 11. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tapi tidak terbaca pada portal SSCASN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 12. Setelah proses unggah/upload dokumen selesai, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran CASN tahun 2023;
 - 13. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 14. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi;
 - 15. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN dapat dilihat atau diunduh di portal SSCASN BKN.

V. MASA SANGGAH

- 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui *di* portal SSCASN BKN;
- 2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 3. Panitia Seleksi mengumumkan jawaban sanggahan sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- 4. Masa Sanggah tidak memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan atau belum lengkap dokumen yang dipersyaratkan.

VI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Panselda/ Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda/ Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Jika pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
4. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Masa Hubungan Kerja :
 - a. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK selama 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, penilaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Untuk Pelamar yang usianya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, maka masa hubungan kerja selama 1 (satu) tahun.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

8. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui website <https://bkd.tulungagung.go.id> atau di portal SSCASN BKN;
9. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS oleh Panselda akan diumumkan melalui website <https://bkd.tulungagung.go.id> atau di portal SSCASN BKN dan Panselda tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak diketahui oleh pelamar karena kelalaian pelamar dalam mengakses informasi;
10. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 membuka **helpdesk** melalui Nomor WA : **089510508041**, Email : seleksiasntulungagung@gmail.com
11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 disampaikan melalui :
 - a. Instagram : [@bkpsdmtulungagung](#)
 - b. Facebook : [@bkdtulungagungkab](#)

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	Menyesuaikan dengan jadwal Panitia Seleksi Nasional
2	Pendaftaran Seleksi	
3	Seleksi Administrasi	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5	Masa Sanggah	
6	Jawab Sanggah	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	
8	Penarikan data final	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	
14	Pengumuman Kelulusan	
15	Masa Sanggah	
16	Jawab Sanggah	
17	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Hasil Sanggah	
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
19	Pengisian DRH NI PPPK	
20	Usul Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2023

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003

LAMPIRAN SURAT PENGUMUMAN PANSELDA
NOMOR : 800/ 02 /PANSELDA.TA/2023
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN FORMASI JF TEKNIS PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 ILMU KOMPUTER;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM ANALIS HUKUM
3	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KESEHATAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERHUBUNGAN
12	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS SOSIAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
13	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
14	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG INSPEKTORAT
15	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
16	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;D-IV TEKNIK MESIN	2 TAHUN	2	0	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
17	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI;S-1 SOSIOLOGIS;D-IV MANAJEMEN;D-IV SOSIOLOGI;S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM;D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
18	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
19	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	1	0	0	1	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABID. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN PEMASARAN;D-IV MANAJEMEN PEMASARAN;D-IV ADMINISTRASI NIAGA;S-1 ADMINISTRASI NIAGA	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
21	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV KEARSIPAN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
22	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV EKONOMI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERHUBUNGAN
23	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 ILMU PERTANIAN	2 TAHUN	2	0	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KETAHANAN PANGAN
24	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN;D-IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN;S-1 PERIKANAN BUDIDAYA;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;D-IV PENYULUHAN PERIKANAN;S-1 PEMASARAN;D-IV PEMASARAN	2 TAHUN	3	2	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERIKANAN
25	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 ILMU PANGAN;S-1 AGROBISNIS;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN;S-1 EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN;S-1 AGROEKOTEKNOLOGI;S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KETAHANAN PANGAN
26	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 HUKUM;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU EKONOMI;D-IV HUKUM;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	2 TAHUN	3	1	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
27	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;D-IV TEKNIK PERTANIAN;D-IV PERTANIAN;S-1 EKONOMI;D-IV TEKNIK PENGAIRAN;S-1 AGROBISNIS;D-IV EKONOMI	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERTANIAN
28	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
29	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 HUKUM;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABID. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
30	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI NEGERA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
31	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
32	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
33	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 KEARSIPAN;S-1 PERPUSTAKAAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV KEARSIPAN;S-1 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 KEARSIPAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ADMINISTRASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
36	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEARSIPAN;S-1 HUKUM;D-IV KEARSIPAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
37	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERHUBUNGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
38	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 HUKUM;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
40	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 KEARSIPAN;S-1 HUKUM;S-1 PERPUSTAKAAN;D-IV PERPUSTAKAAN;S-1 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;D-IV PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;D-IV KEARSIPAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
41	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA;S-1 ILMU BAHASA;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU TEKNIK DAN REKAYASA;D-IV ILMU TEKNIK DAN REKAYASA	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
42	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
43	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SEJARAH;S-1 SASTRA JAWA KUNO;S-1 FILSAFAT;S-1 SENI PEDALANGAN	2 TAHUN	2	0	1	1	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
44	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2 TAHUN	3	0	2	1	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
45	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN BENCANA;D-IV MANAJEMEN BENCANA;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;D-IV TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI;S-1 PLANOLOGI;D-IV PLANOLOGI;S-1 ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 GEOGRAFI;D-IV GEOGRAFI;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 PSIKOLOGI;D-IV PSIKOLOGI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM;S-1 TEKNIK GEOLOGI;D-IV TEKNIK GEOLOGI;S-1 STATISTIK;D-IV STATISTIK;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
46	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PLANOLOGI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2 TAHUN	4	1	3	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 ILMU PETERNAKAN;D-IV PETERNAKAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
48	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;D-IV HUKUM;S-1 HUKUM;S-1 AKUNTANSI;D-IV EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI	2 TAHUN	3	1	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
49	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 ILMU PETERNAKAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 EKONOMI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BANDUNG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
51	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PSIKOLOGI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BESUKI
52	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BOYOLANGU
53	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT CAMPURDARAT
54	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT GONDANG
55	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KALIDAWIR
56	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 PSIKOLOGI;S-1 HUKUM;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KARANGREJO
57	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	D-IV PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KAUMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
58	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KEDUNGWARU
59	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PSIKOLOGI	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT NGANTRU
60	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT NGUNUT
61	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PAGERWOJO
62	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PAKEL
63	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PUCANGLABAN
64	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT REJOTANGAN
65	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT SENDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
66	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 PSIKOLOGI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT SUMBERGEMPOL
67	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT TANGGUNGUNUNG
68	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUKUM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT TULUNGAGUNG
69	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI	2 TAHUN	3	0	2	1	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN;D-IV HUKUM;D-IV MANAJEMEN;S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM;S-1 AGROBISNIS;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 HUKUM;D-IV TEKNIK INDUSTRI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
71	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
72	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS SOSIAL
73	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
74	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABID. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
75	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV HUKUM;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 AKUNTANSI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
76	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AGRIBISNIS;S-1 AGRIBISNIS;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI;D-IV TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
77	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AGRIBISNIS;S-1 MANAJEMEN INDUSTRI;D-IV MANAJEMEN INDUSTRI;S-1 MANAJEMEN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
78	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AGRIBISNIS;S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI;D-IV TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI;S-1 MANAJEMEN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
79	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
80	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AGRIBISNIS;D-IV AGRIBISNIS;S-1 TEKNIK ELEKTRO;D-IV TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH
81	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
82	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS;D-IV ADMINISTRASI BISNIS;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS;D-IV ILMU ADMINISTRASI BISNIS	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
83	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BANDUNG
84	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BESUKI
85	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT BOYOLANGU
86	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;D-IV PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT CAMPURDARAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
87	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT GONDANG
88	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KALIDAWIR
89	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KARANGREJO
90	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KAUMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
91	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;S-1 PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT KEDUNGWARU
92	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT NGANTRU
93	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 PEMERINTAHAN;D-IV PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT NGUNUT
94	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 EKONOMI;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 TEKNIK	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PAGERWOJO

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
		INFORMATIKA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA						
95	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PAKEL
96	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT PUCANGLABAN
97	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT REJOTANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
98	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGERA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN PUBLIK	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT SENDANG
99	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ADMINISTRASI NEGERA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT SUMBERGEMPOL
100	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV ADMINISTRASI NEGERA;D-IV PEMERINTAHAN;S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA;S-1 PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGERA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;D-IV MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ADMINISTRASI NEGERA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT TANGGUNGUNUNG
101	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV EKONOMI;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGERA;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG CAMAT TULUNGAGUNG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
		INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA						
102	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D- IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 PARIWISATA	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
103	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D- IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
104	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 AGROBISNIS;S- 1 BUDI DAYA PERIKANAN;S-1 MANAJEMEN;D-IV AKUNTANSI	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
105	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU KOMUNIKASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KESEHATAN
106	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ADMINISTARI NEGERA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV EKONOMI;S-1 TEKNIK PANGAN;D-IV AGRIBISNIS PERTANIAN;S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN;D-IV TEKNIK PANGAN;S-1 PERTANIAN;S-1 TANAMAN PANGAN	2 TAHUN	2	0	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KETAHANAN PANGAN
107	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KOMPUTER;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
108	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS;D-IV ADMINISTRASI BISNIS;D-IV ILMU ADMINISTRASI BISNIS	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
109	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV AKUNTANSI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 LINGKUNGAN HIDUP;D-IV LINGKUNGAN HIDUP	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP
110	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
112	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
113	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	0	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
114	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV AKUNTANSI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERHUBUNGAN
115	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 PERIKANAN;D-IV PERIKANAN;S-1 BUDIDAYA PERAIRAN	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERIKANAN
116	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI;D-IV ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN PAJAK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU PEMERINTAH;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2 TAHUN	2	0	2	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
117	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;D-IV PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;S-1 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
118	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 PERTANIAN;D-IV PERTANIAN;S-1 PERTANIAN AGRIBISNIS;S-1 PERTANIAN AGROBISNIS	2 TAHUN	2		1	1	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERTANIAN
119	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MIPA;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 PETERNAKAN	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
121	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV HUKUM;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2 TAHUN	2	0	1	1	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS SOSIAL
122	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV MANAJEMEN PEMASARAN;D-IV ADMINISTRASI NIAGA;S-1 MANAJEMEN PEMASARAN;S-1 ADMINISTRASI NIAGA	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
123	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG INSPEKTORAT
124	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
125	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM	2 TAHUN	2	1	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
126	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;S-1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU KOMUNIKASI	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DPRD
127	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA;S-1 ILMU HUKUM;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2 TAHUN	2	2	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DPRD
128	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	2 TAHUN	1	1	0	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
129	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;S-1 TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH
130	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
131	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
132	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERIKANAN
133	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;S-1	2 TAHUN	1	0	1	0	BUPATI TULUNGAGUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
		PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI						
134	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	2 TAHUN	8	0	8	0	BUPATI TULUNGAGUNG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BID ANG PEMADAM KEBAKARAN
TOTAL				197	54	137	6	

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19640119 198508 1 003